

**PERANAN JAMINAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN  
BERMASALAH DI BMT TUMANG CABANG DELANGGU KABUPATEN  
KLATEN**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Hukum  
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Oleh:

**ARINA LINDA KURNIAWATI**

**I000132016**

**NIRM: 13/X/02.1.2/0080**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2017

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERANAN JAMINAN DALAM PENYELESAIAN  
PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT TUMANG CABANG DELANGGU  
KABUPATEN KLATEN**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**ARINA LINDA KURNIAWATI**

**I000132016**

**NIRM: 13/X/02.1.2/0080**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**Dr. Muhammad Muhtarom, S.H., M.H**

**NIK. 382**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERANAN JAMINAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN  
BERMASALAH DI BMTTUMANG CABANG DELANGGU KABUPATEN  
KLATEN**

Oleh:

**ARIÑA LINDA KURNIAWATI**

**I000132016**

**NIRM: 13/X/02.1.2/T/0080**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Selasa, 18 Juli 2017  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Dewan Penguji**

1. **Dr. Imron Rosyadi, M.Ag**

(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. **Yayuli, S.Ag., M.PI**

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

3. **Drs. Harun, MH.**

(Anggota III Dewan Penguji)

(.....)

Dekan,  
  
**Dr. Swamsul Hidayat, M.Ag**  
NIK. 606

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan di atas, maka saya mempertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 3 Juli 2017

Penulis



**ARINA LINDA KURNIAWATI**

**I000132016**

**PERANAN JAMINAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN  
BERMASALAH DI MBT TUMANG CABANG DELANGGU  
KABUPATEN KLATEN**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan jaminan ketika terjadi pembiayaan bermasalah beberapa pokok masalah diantaranya yaitu Bagaimanakah proses pentaksiran jaminan di BMT TUMANG terhadap jaminan sebagai syarat pembiayaan dan bagaimanakah peranan jaminan dalam menyelesaikan permasalahan pada pembiayaan bermasalah di BMT TUMANG. Pembiayaan bermasalah ini akan berdampak negatif jika pihak BMT tidak segera menyelesaikannya. BMT bisa melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah terlebih dahulu dengan cara restrukturisasi (*second way out*) dan jika dengan cara itu tidak menemukan hasil maka hal yang dilakukan terakhir yaitu penarikan jaminan.

Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan atau ke tempat yang menjadi objek penelitian (BMT Tumang cab Delanggu) sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat. Sifat penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yang bersifat deskripsi-analisis yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan yang ada di BMT Tumang cab Delanggu dan selanjutnya menganalisisnya berdasarkan penelitian dan literatur yang dianggap relevan serta berfungsi untuk mendapatkan kesimpulan dari masalah yang dibahas di BMT TUMANG Cabang Delanggu.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Jaminan-jaminan di BMT TUMANG cabang Delanggu sebelum ditaksasi atau di taksir oleh BMT terlebih dahulu dilakukan plotting untuk menemukan data-data atau keadaan jaminan sebenarnya. Peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT TUMANG adalah pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *second way out*. Sebelum dilakukan *second way out* BMT TUMANG melakukan *first way out*. *First way out* dilakukan dengan *Rescheduling* (penjadwalan kembali), selanjutnya dengan melakukan *Reconditioning* dan *Restructuring*. Penjualan jaminan ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh BMT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah Untuk BMT TUMANG sebelum dilakukan penjualan jaminan, BMT melakukan berbagai macam cara seperti melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk menemukan titik terang. BMT menawarkan terlebih dahulu kepada debitur apakah penjualan jaminan dilakukan oleh BMT atau oleh debitur sendiri. Jika nasabah menyerahkan kepada BMT untuk menjual jaminan tersebut, maka BMT akan melakukan penjualan jaminan tersebut atau mempersilakan kepada nasabah tersebut untuk menjual jaminannya sendiri.

**Kata kunci: pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan, jaminan**

## **ABSTRACT**

This study aims to determine the role of collateral when there are the problem on financing, some of the principal issues such as how the process of guarantee assurance in BMT TUMANG against collateral as a condition of financing and how the role of guarantee in solving problems on problematic financing in BMT TUMANG. This problematic financing will have a negative impact if the BMT does not immediately resolve it. BMT can perform rescue financing problem firstly by restructuring (second way out) and if it does not find the result then the last thing that is withdrawal guarantee.

The Researcher used field research (field research) as her Research Method, the research had to directly come to the *field* or to place which become the object of research (BMT Tumang cab Delanggu). This research is focused to trace and study the material that exist in field and relevant to problem which is raised. The nature of the research used is research that is the descriptions of the research that describes the problems that exist in BMT Tumang of Delanggu and further analyze it based on research and literature that are relevant and serves to get the conclusions of the problems discussed in BMT TUMANG of Delanggu.

Research results indicate that the Guarantees in BMT TUMANG Delanggu before being imposed or in the appraisal by BMT firstly done plotting to find the data or the state of the actual guarantee. The role of collateral in the settlement of non-performing financing in BMT TUMANG is on the settlement of non-performing financing by way of second way out. Before it does the second way out, firstly BMT TUMANG do first way out. First way out is done by Rescheduling (rescheduling), then by doing Reconditioning and Restructuring. The sale of this guarantee is the last step done by BMT in financing the problem For BMT TUMANG prior to the sale of collateral, BMT perform various ways such as conducting a discussion to find a the way out. BMT offers first to the debtor whether the sale of collateral is done by BMT or by the debtor itself. If the customer submits to BMT to sell the guarantee, the BMT will either sell the guarantee or invite the customer to sell the guarantee itself.

**Keywords: Problematic financing, Financing Settlement, Guarantee**

## 1. PENDAHULUAN

Situasi lingkungan eksternal dan internal BMT mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha BMT sehingga meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola BMT yang sehat dan penerapan pendanaan atau bisa disebut juga pembiayaan, ketika berbicara BMT tidak lepas dari kata pembiayaan, dari kata pembiayaan sendiri tidak pernah lepas dari kata pembiayaan yang bermasalah, dan bahkan tidak ada suatu lembaga yang tidak mempunyai masalah dalam persoalan pembiayaan. BMT yang penulis teliti juga demikian.

Baitul maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.<sup>1</sup> Untuk itu sangat penting melakukan pengawasan aktif, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran jaminan, sistem informasi, dan pengendalian risiko pembiayaan bermasalah, serta sistem pengendalian intern.<sup>2</sup>

Setiap lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan pasti memiliki risiko, salah satunya adalah pembiayaan tersebut akan menjadi bermasalah atau pembiayaan dimana pihak anggota tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pengembalian pokok pembiayaan, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan anggunan dan sebagainya. Adanya pembiayaan bermasalah akan menyebabkan pendapatan BMT menurun, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba yang pada akhirnya berindikasi pada sektor perekonomian secara makro.

---

<sup>1</sup> Muh. Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm, 126

<sup>2</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 941

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu proses dimana risiko pembiayaan atau kredit diidentifikasi, ditaksir, dan dikelola dengan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*).<sup>3</sup> Dalam BMT, risiko pembiayaan ada dua macam yaitu risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.<sup>4</sup>

Esensi penerapan manajemen risiko pembiayaan bermasalah adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha BMT tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan BMT. Risiko pembiayaan bermasalah dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan BMT.<sup>5</sup>

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pendekatan Hukum tidak banyak dilakukan oleh BMT, kebanyakan ada etikad baik dari nasabah, dan ada juga anggota yang tidak mempunyai etikad sama sekali. Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh BMT merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (Non Performance financing).

Pembiayaan yang semakin besar, BMT harus siap dalam menghadapi risiko-risiko akibat pembiayaan yang mengalami masalah. Tidak Semua jenis pembiayaan mengalami masalah ada pembiayaan tertentu yang mengalami masalah tersebut. Sehingga perlu diterapkan manajemen yang baik, dan proses pentaksiran yang benar agar tidak adanya salah pentaksiran jaminan dan akan berakibat fatal pada BMT itu sendiri, yang dapat meminimalisir risiko yang akan timbul dari pembiayaan salah satunya dengan adanya jaminan.

<sup>3</sup> [http://bankirnews.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=103](http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=103), akses tanggal 18 Juli 2017

<sup>4</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis fiqiyah dan keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 260.

<sup>5</sup> *Ibid*



Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis untuk mengadakan penelitian mengenai **“Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Tumang Cabang Delanggu Kabupaten Klaten “**.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti langsung terjun kelapangan atau ke tempat yang menjadi objek penelitian (BMT Tumang cab Delanggu) sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat.

### **2.2 Tempat dan Subjek Penelitian**

Peneitian ini bertempat di BMT TUMANG Cabang Delanggu, Klaten. Subjek penelitian tentang peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

### **2.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan :

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk di jawab. Teknik wawancara peneliti menggunakan Hand phone sebagai alat bantu merekam dan mendekati sumber informasi dengan cara melakukan tanya jawab dengan Manager di BMT Tumang cab Delanggu Klaten untuk mengetahui peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Tumang cab Delanggu Klaten.

Observasi adalah dasar ilmu dan dasar untuk mengetahui kebenaran ilmu. Obesrvasi harus dilakukan secara sistematis agar sedapat mungkin *valid* dan *variable*.

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang terdaftar sebagai metode penelitian. Dokumentasi asal katanya dokumen yang artinya

barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, koran, fotokopi dokumen-dokumen BMT Tumang cabang Delanggu, akad-akad, brosur-brosur pembiayaan dan lain sebagainya.

#### **2.4 Metode Analisis Data**

Setelah data terkumpul dari sumber data primer dan sumber data sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara kualitatif dengan deskripsi-analisis dengan menggunakan kerangka berpikir induksi dan deduksi, dari metode analisis data ini akan diperoleh kesimpulan dari penelitian ini. Analisis data dari penelitian ini data dari penelitian ini dimulai dari mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, diseleksi dan di susun untuk menarik suatu kesimpulan. Untuk menganalisis data yang sudah diperoleh peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Metode berfikir yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode induktif dan deduktif. Metode induktif yang menganalisis data yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus tadi ditarik generalisasi yang bersifat umum metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan umum menuju khusus.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 PENTAKSIRAN JAMINAN OLEH BMT TUMANG CABANG DELANGGU SEBAGAI SYARAT PEMBIAYAAN**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pihak manager di BMT Tumang cabang Delanggu yaitu pihak yang menangani langsung proses pentaksiran jaminan itu sendiri menjelaskan, pemberian pembiayaan kepada nasabah sangat mengandung resiko, sehingga pelaksanaan nya harus memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat, yaitu tidak diperkenankan memberikan pembiayaan tanpa surat perjanjian

tertulis. Guna mengurangi resiko kerugian faktor adanya jaminan inilah yang penting harus diperhatikan, sehingga dalam pasal 8 undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 ditentukan bahwa dalam pemberian pembiayaan pihak bmt wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaan yang telah disepakati melalui proses akad yang sudah dilakukan sebelum melakukan pembiayaan, bmt juga wajib melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha debitur mengingat bahwa jaminan salah satu unsur penting dalam pemberian pembiayaan, maka guna memperoleh keyakinan tersebut pihak anggota yang melakukan pembiayaan wajib memberikan jaminan.<sup>6</sup> Proses Pentaksiran jaminan itu sendiri dilihat dari jaminan yang diberikan kepada BMT maksimal plafond pembiayaan (pengajuan kredit ) sebesar 60-70 % dari nilai jaminan ( Agunan ) yang diberikan oleh nasabah yang melakukan pengajuan Pembiayaan.

### **3.2 PERANAN JAMINAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN PERMASALAHAN DI BMT TUMANG CABANG DELANGGU**

Berdasarkan penyajian data dan teori umum tentang pembiayaan bermasalah pada BMT<sup>7</sup>, diketahui bahwa pembiayaan bermasalah pada BMT memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah. Dari jumlah total semua nasabah pembiayaan sejak bulan Januari 2017 nasabah pembiayaan terdapat pembiayaan bermasalah pada BMT Tumang cabang Delanggu. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan tidak semua pembiayaan yang ada di BMT Tumang bermasalah semua, di BMT tumang itu sendiri aja 2 pembiayaan yang bermasalah yaitu pembiayaan *Mudharabah dan Musyarakah* dan BMT Tumang mempunyai cara berbeda2 untuk menyelesaikan permasalahan, tergantung sejauhmana pembiayaan itu bermasalah maka pihak BMT akan melakukan cara dalam mengelola pembiayaan agar bisa meminimalisasikan pembiayaan bermasalah.

---

<sup>6</sup> Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional*, h.73

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bapak manajer BMT Tumang pada tanggal 20 Januari 2017

Pada BMT Tumang Cabang Delanggu bergerak secara khusus melayani dan menangani semua pembiayaan-pembiayaan bermasalah yang sudah dibiayai Bank BMT Tumang agar dapat diselesaikan<sup>8</sup>, baik itu dengan cara melanjutkan pembiayaan yang sudah berjalan atau dilakukan penarikan barang yang sudah dibiayai oleh BMT, apapun kebijakan yang dilakukan itu hanya bertujuan untuk mempertahankan pembiayaan yang sudah berjalan agar tidak terjadi kemacetan dan tidak merugikan pihak BMT. Di samping itu BMT juga bertugas menyelesaikan pembiayaan yang sudah tidak bisa dipertahankan seperti pembiayaan bermasalah atau bisa disebut dengan pembiayaan macet.

#### 4. ANALISIS DATA

Secara Keseluruhan dalam Praktek peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Tumang cabang Delanggu sudah mendekati kesempurnaan, karena dalam praktek yang dilaksanakan tidak jauh berbeda dengan teori-teori dan peraturan yang ada. Meskipun secara keseluruhan sudah mendekati kesempurnaan akan tetapi ada sedikit kesamaran mengenai obyek jaminan atau bisa saja salah taksir jaminan lebih tepatnya pihak BMT salah menaksirkan jaminan dan memberi pembiayaan yang lebih dari pada jaminan.

##### 4.1 Analisis Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Tumang cabang Delanggu Kab. Klaten Jawa Tengah.

###### 1. Akad Pembiayaan *marhun* dan *marhun bih*

Pelaksanaan praktik Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian pembiayaan di BMT Tumang Cabang Delanggu menggunakan sistem pembacaan akad terlebih dahulu yang dilakukan pihak manager dan di dengarkan oleh pihak anggota yang melakukan pembiayaan dapat dikatagorikan dengan akad lisan yang memberi pengarahan dan saling bertatap muka sambil melempari berbagai pertanyaan. Dalam pelaksanaan akad ini, masyarakat setempat lebih jelas menggunakan bahasa daerah setempat (yaitu Bahasa Jawa) tetapi ada juga anggota

---

<sup>8</sup> Ibid

yang lebih suka dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak yang melakukan pembiayaan dapat dengan jelas dan mudah untuk memahami maksud yang dijelaskan oleh pihak manajer pada waktu akad berlangsung.

## 2. Pelaku pembiayaan ( Nasabah dan pengelola BMT)

Pelaksanaan praktek peranan jaminan dalam pembiayaan bermasalah antara nasabah dan BMT sudah ada syarat-syarat tertentu yang sudah ditentukan dan wajib dibawa dan ditepati pihak anggota pembiayaan. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi adalah orang yang sudah baligh, berakal dan cakap bertindak hukum.

## 3. Obyek Jaminan

Dalam hal ini jaminan yang digunakan untuk melakukan pembiayaan sudah jelas yaitu berupa BPKP dan sertifikat , yakni jaminan yang dimiliki nasabah yang akan diberikan kepada BMT saat melakukan pembiayaan dan jaminan milik nasabah sendiri jika tidak atas nama sendiri aka menggunakan surat kuasa. Akan tetapi jika dilihat dari syarat jaminan yang digunakan atau diakadkan dalam Islam ataupun syarat dari BMT adalah barang tersebut harus ada, jaminan atas nama sendiri, barang yang memiliki nilai/harta tertentu, suci, tidak bermasalah, dan harus ditentukan dan dijelaskan secara pasti pada waktu akad.<sup>9</sup>

## 4.2 Analisis proses pentaksiran jaminan di BMT Tumang Cabang Delanggu.

Pada BMT Tumang juga menggunakan prinsip 5C<sup>10</sup> agar tidak ada lagi pentaksiran jaminan yang salah maka yang menjadi dasar dalam keputusan suatu pembiayaan apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak.

## 4.3 Analisis peranan jaminan dalam penyelesaian permasalahan pembiayaan Bermasalah.

Dalam memberikan pembiayaan dalam masyarakat, BMT mempunyai

---

<sup>9</sup> Mardanani, *fiqh Ekonomi Syariah*, hlm 103

<sup>10</sup> *Ibid*

pendapatan yang berasal dari pembiayaan dan simpanan, sehingga dalam pemberian pembiayaan kredit pihak BMT mensyaratkan adanya jaminan sebagai pengaman jika debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, namun sering terjadi pula debitur melakukan wanprestasi, sehingga menyebabkan pembiayaan macet. Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 bersama Bapak Rifau sebagai manajer di BMT Tumang dalam menentukan kriteria Pembiayaan dapat dinyatakan macet, karena dalam jangka waktu yang telah ditentukan debitur tidak dapat melunasinya, sehingga debitur dinyatakan lalai.

Anggota BMT yang melakukan pembiayaan di BMT Tumang berdasarkan analisis yang penulis lakukan yaitu sekitar 2,4 % pembiayaan yang macet oleh karena itu fungsi jaminan itu sendiri adalah menjamin agar debitur tidak semena-mena dalam menyanggupi kewajiban yang telah disepakati. Jika ditinjau dari aspek finansial, jaminan ini dimaksudkan untuk melindungi shahibul maal agar dapat menuntut atau menarik kembali fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada mudharib tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>11</sup> Sedangkan jika dilihat dari aspek hukum, jaminan merupakan sarana untuk melakukan penegakan hukum agar mudharib dapat mematuhi substansi yang telah disepakati di dalam akad pembiayaan. Pencantuman jaminan maupun yang berhubungan dengan jaminan di menandakan bahwa jaminan adalah satu hal yang tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan kesepakatan bersama yaitu adanya aturan tentang jaminan. Jaminan menjadi penting ketika shahibulmal khawatir akan munculnya penyelewengan dari mudharib. Dari analisis tersebut dapat dikatakan bahwa praktek peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Tumang cabang Delanggu sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum islam. Dan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah sudah sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dan peranan jaminan itu sendiri sangatlah penting dalam bab pengajuan pembiayaan. Obyek penjualan jaminan pun sudah sesuai dan tidak adanya penjualana jaminan secara paksa dan transparan.

---

<sup>11</sup> Zainul Arifin, *Memahami bank Syariah Lingkup Ruang Tantangan dan Prospek*, Alvabet, Jakarta, 2000, hlm. 20.

## **5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Sebagaimana rangkaian dari keseluruhan isi pembahasan skripsi ini, maka dalam bab terakhir ini kesimpulan yang bisa ditarik ialah jaminan-jaminan di BMT TUMANG cabang Delanggu sebelum ditaksasi atau di taksir oleh BMT terlebih dahulu dilakukan plotting untuk menemukan data-data atau keadaan jaminan sebenarnya. Peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT TUMANG ini adalah pada penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT TUMANG dengan cara *second way out*. Sebelum dilakukan *second way out* ini BMT TUMANG melakukan *first way out*. *First way out* dilakukan dengan *Rescheduling* (penjadwalan kembali), selanjutnya dengan melakukan *Reconditioning* dan *Restructuring*. Penjualan jaminan ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh BMT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah Untuk BMT TUMANG sebelum dilakukan penjualan jaminan, BMT melakukan berbagai macam cara seperti melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk menemukan titik terang. BMT menawarkan terlebih dahulu kepada debitur apakah penjualan jaminan dilakukan oleh BMT atau oleh debitur sendiri. Jika nasabah menyerahkan kepada BMT untuk menjual jaminan tersebut, maka BMT akan melakukan penjualan jaminan tersebut atau mempersilakan kepada nasabah tersebut untuk menjual jaminannya sendiri.

### **5.2 Saran**

Setelah melakukan penelitian sampai analisis kesimpulan Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Tumang ini, ada beberapa saran yang perlu disampaikan yaitu semoga suatu saat nanti jaminan di BMT ditiadakan, agar lebih memudahkan para pelaku usaha dalam memohon pembiayaan ke BMT. Jika jaminannya tidak diberikan ke BMT bisa dipakai untuk memperlancar akomodasi usaha. Namun hal ini juga tidak akan terlaksana jika nasabah BMT sendiri belum meunjukkan “akhlaq al-karimah” nya. Dan dalam akad perjanjian antara nasabah pembiayaan dan BMT agar BMT memberikan

waktu kepada nasabah pembiayaan untuk mempelajari akad pembiayaan tersebut sebelum melakukan tanda tangan, jangan hanya sebagian saja dibacakan ketika terjadi akad perjanjian. Dan semoga penelitian ini sebagai langkah awal yang perlu dilanjutkan oleh peneliti-peneliti berikutnya di BMT atau bank lainnya. Karena seperti kata para linguist mengatakan bahasa akan berubah setiap seratus tahun sekali. Begitu juga permasalahan yang akan dihadapi oleh BMT akan terus berkembang sesuai dengan masanya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Al-Jaziri, 1994. *Fiqh Empat Mazhab jilid IV*, Semarang: CV. Asy-Syifa
- Adiwarman A. Karim, 2004. *Bank Islam Analisis fiqiyah dan keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Alaidin koto, 2004. *Imu fiqh dan fiqh* (suatu pengantar), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ali Hasan, 2004. *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Euis Amalia, M Taufiqi dan Dwi Nuraini I, 2007. *Konsep dan Mekanisme Bank Syariah*, Jakarta : FSH UIN Syahid
- Gatot Supramono, 1996. *Perbankan dan Permasalahan kredit : Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta : Djambatan
- Hasanudin Rahman, 1995. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hendi Suhendi, 2002. *fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Heri Sudarsono, 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, 2000. *Fiqh Mazhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Kasmir, 2000. *Bank dan Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir, 2001. *Manajemen Perbankan* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- M. Abdul Mujieb dkk, 2002. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus
- Muh. Ridwan, 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press
- Muhammad Firdaus NH, dkk, 2005. *Mengatasi Masalah dengan Pengadaian Syariah*, Jakarta: Renaisans
- Muhammad, 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN



- Sayyid Sabiq, 1996. *Fikih Sunnah 12*, Bandung: Al-ma'rif
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2001. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*, Yogyakarta : Liberty Offset Yogyakarta
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute Bankir Indonesia, 2003. *konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010. *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara  
[http://bankirnews.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=103](http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=103), akses tanggal 18 Juli 2017